

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Realisasi otonomi daerah memberi prospek lebih besar untuk pemerintah daerah dalam hal regulasi dan pengelolaan urusan publik, termasuk tata kelola keuangan daerah. Berkaitan dengan kemandirian daerah tersebut, pemerintah daerah memperoleh keleluasaan lebih besar untuk menggali serta mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang berakar dari kearifan lokal guna menunjang pembelanjaan publik. Kewenangan fiskal ini mengharuskan pemerintah daerah tidak semata-mata mengandalkan aliran dana dari pusat, melainkan juga mampu menaikkan Pendapatan Asli Daerah guna memastikan sumber pendanaan yang berkelanjutan.

Meskipun pemerintah daerah telah dibekali kewenangan yang cukup luas dalam mengelola keuangan daerahnya, upaya peningkatan pendapatan daerah tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi. Keterbatasan dalam pemanfaatan potensi ekonomi lokal, perbedaan kapasitas fiskal antar wilayah, serta belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah menjadi kendala yang sering muncul. Selain itu, fakta bahwa wilayah-wilayah tertentu bersandar pada dana perimbangan dari pusat mencerminkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam menggali PAD masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut mengindikasikan keberhasilan dalam mendongkrak PAD tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan potensi yang dimiliki suatu daerah, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas regulasi dan manajemen ekonomi daerah.

Melalui pelaksanaan pembangunan daerah, ketersediaan sumber pendanaan yang memadai bagi pemerintah daerah merupakan faktor penting bagi keberhasilan berbagai program pembangunan. Pendapatan Asli Daerah berkedudukan sebagai elemen penting pendapatan yang menjadi cerminan tolak ukur pemerintah daerah dalam menanggung urgensi pembangunannya secara independen. Kontribusi PAD yang kian meningkat, memberikan keleluasaan lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang menentukan arah kebijakan pembangunannya, tanpa harus bergantung secara berlebihan kepada pemerintah pusat. Sehingga, peningkatan pendapatan daerah tidak sekedar bermakna sebagai penambahan sumber dana, tetapi juga indikator tingkat otonomi dan kekuatan fiskalnya.

Sektor pariwisata menurut Bank Indonesia (BI), dianggap sebagai salah satu diantara pendapatan ekonomi yang dinilai berpotensi memberikan dampak konkret dalam mendorong pengembangan pendapatan daerah (Adiarti & Wijaya, 2024). Perkembangan sektor pariwisata tak sebatas memacu pergerakan wisatawan, serta sekaligus memicu tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi pendukung seperti akomodasi, usaha kuliner, dan jasa lainnya. Aktivitas tersebut berpotensi memberikan andil terhadap PAD melalui penerimaan pajak, pengelolaan iuran, serta pendapatan dari fasilitas pariwisata. Dengan demikian, salah satu alternatif strategis bagi pemerintah daerah dalam menganekaragamkan sumber pendapatan yakni dengan pengembangan sektor pariwisata melalui pemanfaatan potensi yang ada.

Sektor pariwisata berkorelasi dengan peningkatan PAD, dimana pengeluaran wisatawan akan menciptakan perputaran aktivitas ekonomi

lanjutan di daerah tujuan wisata (Adiarti & Wijaya, 2024). Aktivitas tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha pariwisata, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi bagi sektor-sektor pendukung lain di sekitarnya. Selain itu, peningkatan kegiatan ekonomi tersebut turut berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga berdampak positif pada penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

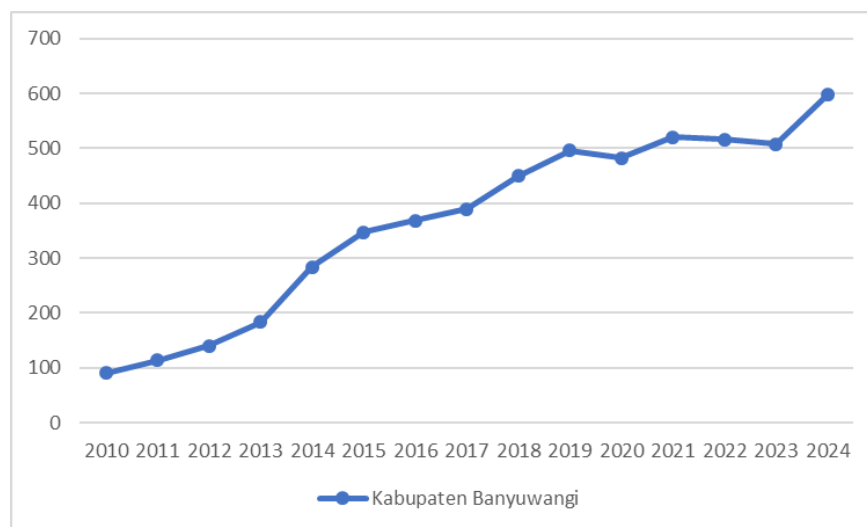
Perkembangan sektor pariwisata dalam suatu daerah dapat dievaluasi menggunakan beberapa indikator yang merefleksikan tingkat aktivitas dan dukungan fasilitas pariwisata. Oleh karena itu, jumlah wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara dipilih sebagai variabel penelitian karena menunjukkan intensitas kunjungan serta daya tarik suatu daerah sebagai tujuan wisata. Di samping itu, jumlah hotel dan jumlah restoran dipilih karena mencerminkan ketersediaan sarana pendukung pariwisata yang berperan dalam melayani kebutuhan wisatawan sekaligus menjadi sumber penerimaan pajak daerah. Keempat indikator tersebut dipilih karena saling berkaitan dan secara bersama-sama menggambarkan dinamika sektor pariwisata yang berpotensi berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Provinsi Jawa Timur ialah satu diantara provinsi dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, tercermin dari beragamnya sektor yang berkembang di wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi di Jawa Timur ditopang oleh berbagai sektor, seperti pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan, yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Keberagaman potensi yang dimiliki tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur tidak hanya bertumpu pada sektor tertentu, melainkan memerlukan pengelolaan yang

terintegrasi guna memastikan akselerasi ekonomi mampu berjalan optimal dan taraf hidup masyarakat membaik, sehingga semua wilayah dapat merasakan manfaatnya secara merata.

Di Jawa Timur, perkembangan industri pariwisata memperlihatkan dinamika yang cukup beragam antar daerah beberapa tahun belakang ini. Sejumlah kabupaten dan kota mampu mengelola potensi pariwisata secara lebih terstruktur sehingga mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan kegiatan ekonomi penunjang, sementara daerah yang lain masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata yang dimiliki. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya potensi pariwisata tidak selalu sejalan dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena dipengaruhi oleh faktor tata kelola, infrastruktur, serta kebijakan daerah.

**Gambar 1. 1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi 2010-2024 (Miliar Rupiah)**



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (diolah, 2025)

Gambar tersebut menunjukkan perkembangan realisasi PAD Kabupaten Banyuwangi, yang menampilkan tren yang kian meningkat setiap tahunnya,

walaupun terjadi fluktuasi pada beberapa periode tertentu. Peningkatan terlihat cukup signifikan sejak sekitar 2013 hingga 2019, yang mengindikasikan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi daerah, termasuk sektor pariwisata dan sektor pendukung lainnya. Pada periode 2020-2021 terlihat adanya perlambatan dan penurunan relatif pada realisasi PAD, yang dapat dikaitkan dengan melemahnya aktivitas ekonomi daerah. Meski begitu, pada periode mendatang PAD kembali mencatat pertumbuhan hingga mencapai nilai tertinggi pada 2024. Pola ini membuktikan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki kecakapan pemulihan ekonomi yang cukup baik setelah mengalami tekanan, serta mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan lokal secara berkelanjutan.

Kabupaten Banyuwangi ialah kawasan yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur yang menawarkan banyak potensi wisata. Kehadiran destinasi unggulan seperti kawasan Kawah Ijen dengan fenomena *blue fire*, kawasan wisata pantai di pesisir selatan dan timur, serta kekayaan budaya lokal seperti tradisi Gandrung dan budaya masyarakat Osing menunjukkan bahwa sektor pariwisata di daerah ini dikembangkan secara lebih terarah. Branding wilayah ini dengan slogan "*The Sunrise of Java*" juga memperkuat posisi Kabupaten Banyuwangi sebagai destinasi wisata terkemuka di Provinsi Jawa Timur.

Selain mengandalkan daya tarik alam dan budaya, pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi juga dilakukan melalui penyelenggaraan berbasis event. Berbagai festival dan agenda pariwisata rutin diselenggarakan sebagai upaya membangun citra positif daerah di tingkat nasional maupun

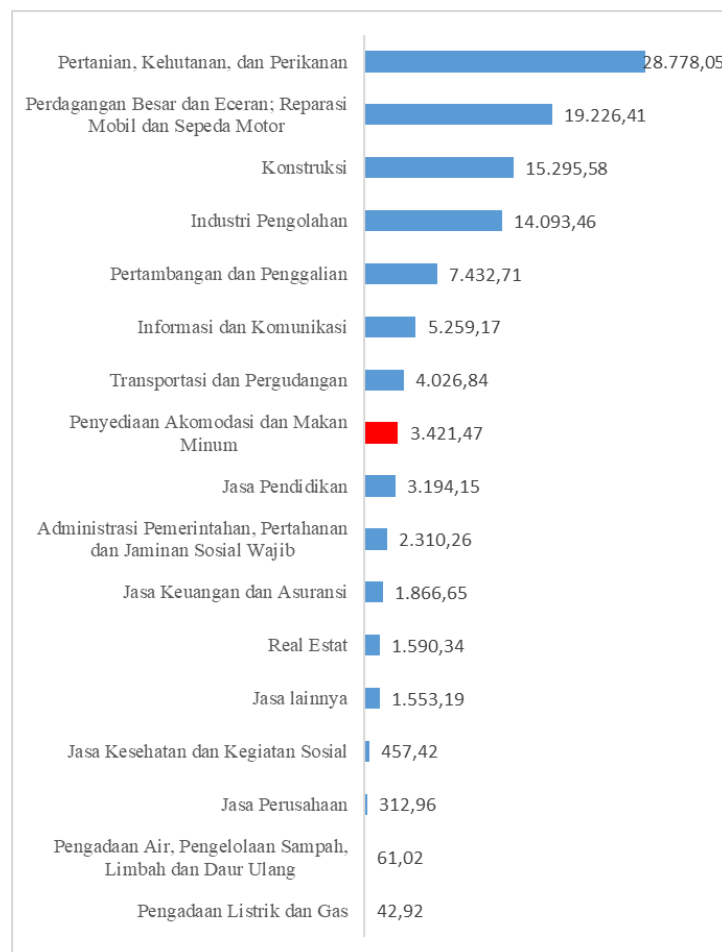
internasional. Strategi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memadukan potensi alam, budaya, dan kreativitas lokal sebagai daya tarik wisata yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya peran sektor pariwisata dalam mendorong kegiatan perekonomian daerah, yang selanjutnya membuka peluang untuk berpartisipasi terhadap penerimaan pajak daerah melalui berbagai sumber pendapatan lokal. Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai lokasi kajian karena memiliki karakteristik pengembangan pariwisata yang menarik untuk diteliti, khususnya dalam pemanfaatan pariwisata berbasis event. Sejumlah agenda pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, di antaranya *Banyuwangi Ethno Carnival* (BEC) dan Gandrung Sewu, merupakan bagian dari program Karisma Event Nusantara (KEN) yang diseleksi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Fakta ini membuktikan bahwasannya kegiatan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya berskala lokal, tetapi juga mendapat perhatian di tingkat nasional.

Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya tercermin dari meningkatnya aktivitas wisata dan penyelenggaraan berbagai event pariwisata, tetapi juga dapat dilihat dari perannya dalam struktur perekonomian daerah. Peran tersebut salah satunya dapat diidentifikasi melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2024 sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mempresentasikan aktivitas pariwisata berada pada urutan kedelapan dengan nilai sebesar 3.421,47 miliar rupiah. Meskipun belum menjadi sektor dominan dibandingkan sektor pertanian, perdagangan, dan

konstruksi, sektor ini tetap memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah melalui penyediaan jasa akomodasi, restoran, dan usaha penunjang pariwisata lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi ekonomi yang cukup besar sehingga relevan untuk diteliti lebih lanjut terkait pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data selengkapnya terkait PDRB Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 1. 2 Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 (Miliar Rupiah)**



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Sejalan dengan potensi sektor pariwisata tersebut, penelitian di Kabupaten Banyuwangi terkait hubungan antara sektor pariwisata terhadap

kinerja ekonomi daerah telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam. Studi oleh Mukaffi & Haryanto (2022) menemukan bahwa indikator pariwisata seperti jumlah wisatawan, restoran, objek wisata, dan daya beli masyarakat memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sementara subsektor tertentu seperti hotel tidak selalu menunjukkan pengaruh signifikan. Sementara itu, penelitian oleh Septiana & Imaningsih (2025) pada kawasan terintegrasi Banyuwangi-Buleleng menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas pariwisata belum secara menyeluruh diiringi oleh peningkatan PAD yang sebanding. Hal ini menandakan bahwa manfaat ekonomi pariwisata belum terserap optimal ke dalam penerimaan daerah. Hasil berbeda ditemukan oleh Wibisono (2018) bahwa pengembangan sektor pariwisata berkontribusi terhadap peningkatan PAD setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan daerah tersebut merefleksikan peran pariwisata yang mempunyai prospek cukup besar dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Meskipun demikian, beberapa studi sebelumnya telah menunjukkan adanya keterkaitan antara sektor pariwisata dan PAD, temuan yang dihasilkan menunjukkan variasi temuan antar daerah dan periode penelitian. Sejumlah studi menegaskan bahwa perkembangan pariwisata mampu mendorong peningkatan PAD, namun besarnya kontribusi dan indikator pariwisata yang berpengaruh tidak selalu sama pada setiap wilayah. Hingga saat ini, kajian yang secara spesifik mengulas pengaruh sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan karakteristik pengembangan pariwisatanya masih relatif terbatas. Kondisi ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut, karena berpotensi menghasilkan kontribusi yang bersifat

dinamis dan dapat mengalami perubahan setiap tahunnya. Atas dasar itulah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis topik tersebut dengan judul **“Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah jumlah wisatawan domestik berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah jumlah wisatawan mancanegara berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi?
3. Apakah jumlah hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi?
4. Apakah jumlah restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, telah beberapa tujuan yang hendak dicapai, di antaranya untuk:

1. Meneliti pengaruh jumlah wisatawan domestik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi.
2. Meneliti pengaruh jumlah wisatawan mancanegara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi.
3. Meneliti pengaruh jumlah hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi.

4. Meneliti pengaruh jumlah restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi.

#### **1.4. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menempatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai objek utama yang dipengaruhi berbagai faktor pariwisata, yakni jumlah wisatawan nusantara, wisatawan asing, jumlah hotel, dan jumlah restoran. Guna membedah signifikansi pengaruh variabel-variabel tersebut, digunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif untuk periode pengamatan 2010 hingga 2024. Validitas data dalam studi ini terjaga melalui penggunaan data sekunder yang dihimpun dari portal resmi *BPS* tingkat provinsi maupun kabupaten, serta sumber relevan lainnya dari otoritas daerah setempat.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, diharapkan penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat berikut:

1. Bagi Teoritis

Besar harapan penulis bahwa hasil penelitian ini mampu memperluas cakrawala berpikir serta turut serta dalam perkembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam hal indikator kepariwisataan. Penelitian ini secara khusus menelaah keterkaitan antara volume kunjungan wisatawan nusantara dan asing, serta pertumbuhan fasilitas pendukung seperti hotel dan restoran, terhadap dinamika PAD Kabupaten Banyuwangi.

## 2. Bagi Praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai dasar penilaian untuk memahami kondisi pariwisata, sekaligus membantu penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan lebih efektif terkait pengelolaan sektor pariwisata, sehingga pada akhirnya dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

## 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diproyeksikan mampu berfungsi sebagai tolak ukur serta sumber informasi yang berguna bagi penelitian berikutnya yang menelaah sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah, serta menjadi tolak ukur bagi pengembangan penelitian berikutnya yang mengangkat isu yang sama.